

INTISARI

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Pekalongan melalui konsep *governance networks*. Fokus utama penelitian ini adalah memetakan bagaimana konfigurasi dan dinamika hubungan antaraktor dalam pengelolaan limbah industri batik di tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menggali interaksi antara pemerintah, operator lapangan, dan pelaku usaha batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan yang terbentuk cenderung bersifat terpusat (*lead organization*), di mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang kendali dominan dalam otoritas dan penyediaan sumber daya. Kondisi ini menempatkan pelaku usaha batik secara umum memiliki keterlibatan yang terbatas sebagai pengguna fasilitas. Namun, ditemukan variasi dinamika pada level operasional, khususnya di unit IPAL Kauman, di mana keberadaan operator mampu menjalankan fungsi penghubung yang penting. Operator tidak hanya melakukan pemeliharaan teknis, tetapi juga menjembatani penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai praktik serta mekanisme pengolahan limbah kepada para pengrajin maupun publik. Hal ini didorong oleh faktor konteks lokal Kauman sebagai kawasan wisata batik yang memperkuat interaksi sosial antaraktor. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jaringan secara formal dikendalikan oleh pemerintah, keberlangsungan pengelolaan di lapangan sangat bergantung pada kapasitas aktor lapangan dalam menjembatani komunikasi dan membangun kesadaran bersama di tingkat mikro.

Kata kunci: *Governance Networks*, IPAL Komunal, Limbah Batik, Interaksi Aktor, Tata Kelola Jaringan.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the Communal Wastewater Treatment Plant (WWTP) policy in Pekalongan City through the concept of governance networks. The primary focus of this study is to map the configuration and dynamics of inter-actor relationships in managing batik industrial waste at the local level. Using a qualitative case study approach, the research explores the interaction between the government, field operators, and batik entrepreneurs. The findings reveal that the resulting network structure tends to be centralized (lead organization), with the Environmental Agency (DLH) holding dominant control over authority and resource provision. This condition generally results in the limited involvement of batik entrepreneurs as facility users. However, variations in dynamics were found at the operational level, particularly in the Kauman unit, where the operator performs an important bridging function. The operator not only handles technical maintenance but also bridges the dissemination of information and knowledge regarding waste treatment practices and mechanisms to both artisans and the public. This is driven by the local context of Kauman as a batik tourism area, which strengthens social interaction among actors. This study demonstrates that although the network is formally controlled by the government, the sustainability of field management heavily depends on the capacity of local actors to bridge communication and build shared awareness at the micro-level.

Keywords: *Governance Networks, Communal WWTP, Batik Waste, Actor Interaction, Network Governance.*